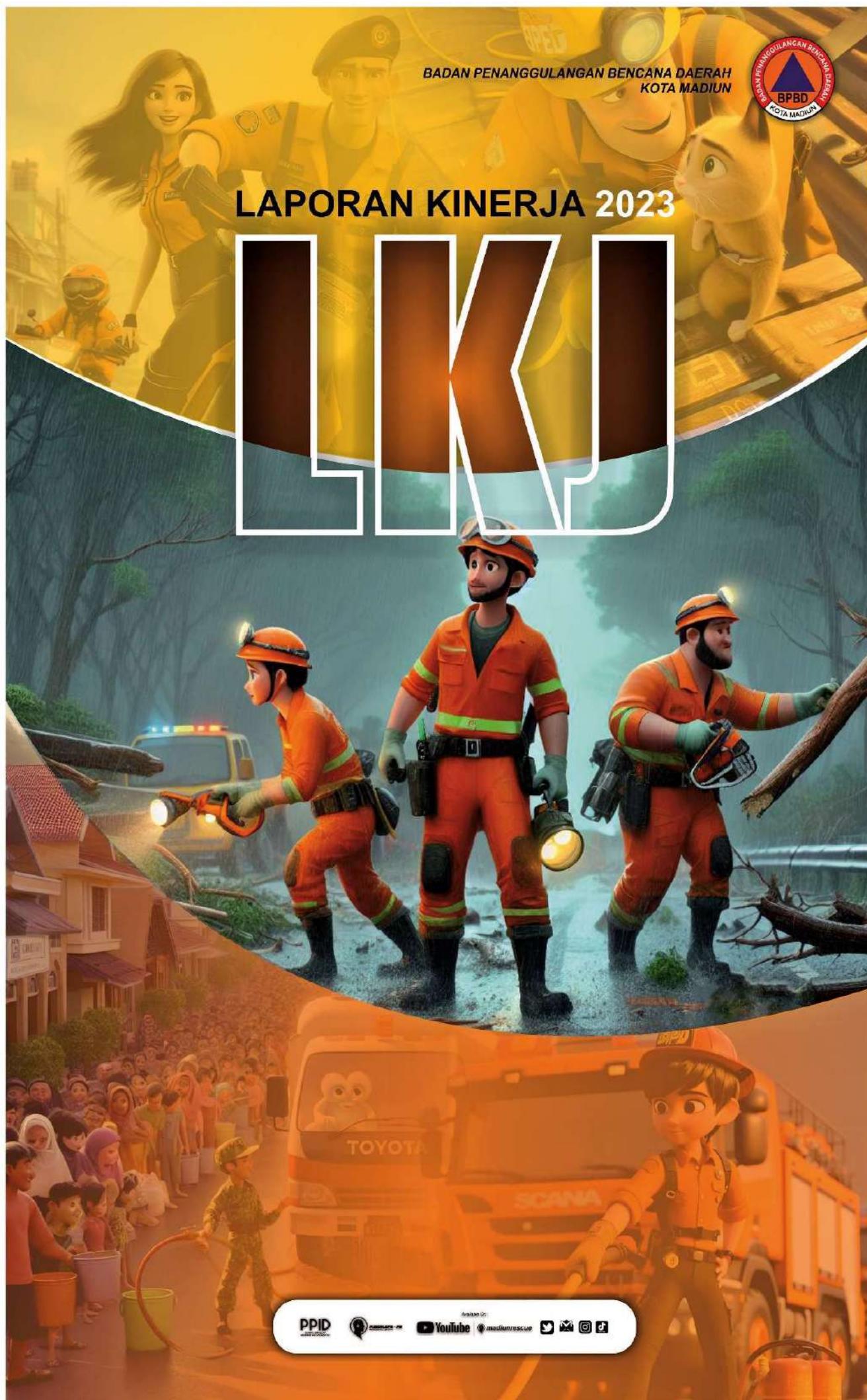


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



LAPORAN KINERJA 2023

LKJ



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah di tetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini masih belum maksimal. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Madiun, 25 Maret 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



H. WAHYUDI

Pembina Tingkat I

NIP. 19671106 199003 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. LATAR BELAKANG | |
| 1.2. LANDASAN HUKUM | |
| 1.3. TUJUAN PENYUSUNAN | |
| 1.4. GAMBARAN UMUM | |
| BAB II RENCANA KINERJA | |
| A. RENCANA STRATEGIS | |
| 1. Tujuan | |
| 2. Sasaran | |
| B. RENCANA KINERJA | |
| 1. Sasaran Dan Indikator Sasaran | |
| 2. Program | |
| 3. Kegiatan | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | |
| 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini ; | |
| 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Bulan Terakhir ; | |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah ; | |
| 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional Maupun Provinsi (Jika ada) ; | |
| 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan ; | |
| 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ; | |

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ;
2. Pohon Kinerja BPBD Kota Madiun ;
3. Penyesuaian Dokumen Perencanaan Tahun 2021-2024 ;
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dan Berita Acara Evaluasi Internal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota MADIUN capaian kinerja dan realisasi anggaran. Indikator kinerja utama dan indicator kinerja sasaran diukur capaiannya dan dianalisis dalam LKj ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki 7 (tujuh) sasaran di tahun 2023 murni. Dengan adanya perubahan dokumen perencanaan berubah menjadi 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dengan indikator Indeks ketahanan daerah dan meningkatnya tata kelola perangkat daerah dengan indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah yang berubah menjadi Nilai Sakip perangkat daerah. Perubahan tersebut guna menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal maupun pendampingan KemenpanRB maka untuk memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dilakukan penajaman pada indikator tujuan dan sasaran sehingga menggambarkan kinerja yang jelas dan terukur. Penajaman ini berdampak pada perubahan dokumen perencanaan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan kebijakan sehingga indikator sasaran untuk Nilai reformasi Birokrasi diganti dengan Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Dari perubahan dua sasaran tersebut nilai pencapaian indikator sasaran secara keseluruhan melebihi target dari masing – masing indikator sasaran.

Pagu anggaran yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp. 3.761.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.686.660.158,00 atau 98.02% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 74.339.842,00. Dengan demikian meskipun ada anggaran yang tidak terserap, tetapi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menunjukkan efisiensi.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Tujuan : Menurunnya Resiko Bencana Daerah | | |
| Indikator : Indeks Risiko Bencana | | |
| Target : 121 | Realisasi : 99.64 | Capaian : 82.35% |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | |
| Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | |
| Target : 85.25 | Realisasi : 85.75 | Capaian : 100.59% |
| 2. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | | |
| Indikator : Indeks Ketahanan Daerah | | |
| Target : 0.35 | Realisasi : 0.46 | Capaian : 131.43% |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta upaya mewujudkan good governance maka perlu disusun laporan kinerja yang merupakan aktualisasi semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk lebih mendayagunakan aparatur negara, yaitu tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, juga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan akuntabel melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama tahun 2023.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana sebagai implementasi dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ;
- h. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
- i. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- j. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 ;

- k. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
- l. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
- m. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- n. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024
- o. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun tujuan penyusunan dari Pelaporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya ;
- d. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Madiun dikandung maksud sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah :

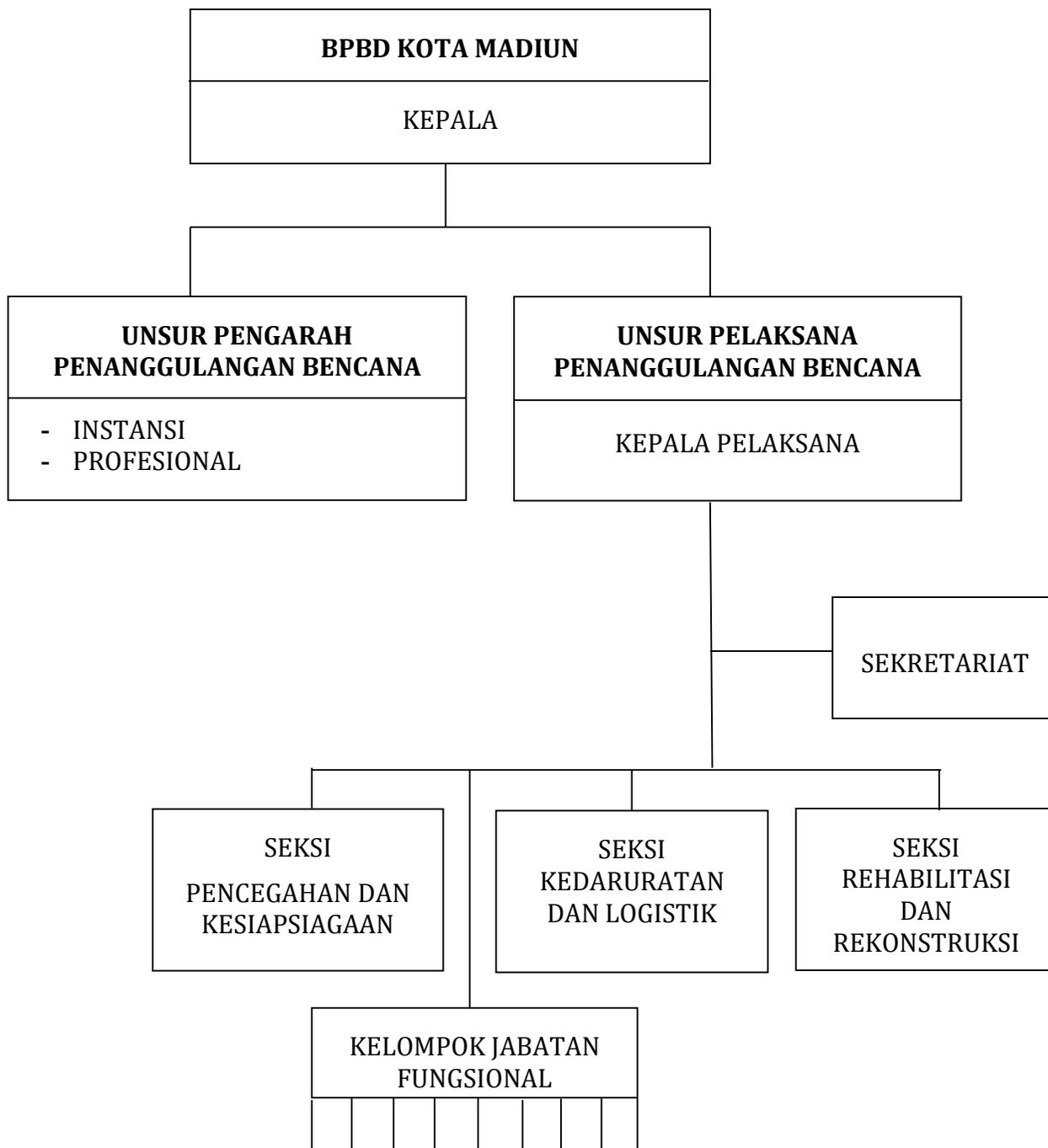
1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- b. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terdapat Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



Sumber Daya BPBD Kota Madiun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

- Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun saat ini memiliki atau di dukung oleh 12 (dua belas) orang pegawai PNS, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jumlah PNS | | Jumlah Tenaga Kontrak | | Pendidikan | | | | | | Golongan | | | | | Jabatan / Eselon | | | |
|----|------------|---|-----------------------|---|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|----|---|----|------------------|-----|----|-----------------|
| | L | P | L | P | S D | S M P | S M A | D 3 | S 1 | S 2 | IV | III | II | I | TK | II | III | IV | Staf/ Pelaksana |
| 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki jumlah Pegawai sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jenis kelamin Laki – laki yaitu 6 (enam) orang, dan Perempuan 6 (enam) orang.

Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar Sarjana/S1 : 6 (enam) orang, S2 : 1 (satu) orang, Sarjana Muda/D3 : 2 (dua) orang, SMA/ sederajat sejumlah 3 (tiga) orang,

Dari 12 (dua belas) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan III : 6 (enam) orang ; Golongan II : 4 (empat) orang ; Golongan IV : 2 (dua) orang.

Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 0 (kosong), Eselon III : 1 (satu) orang, Eselon IV : 4 (empat) orang dan Staf/Pelaksana sejumlah : 7 (tujuh) orang.

- Sarana Prasarana Kantor

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|-----|-----------------------------|--------|---------|
| 1. | Tanah | 1 | Baik |
| 2. | Peralatan Dan Mesin | 684 | Baik |
| 3. | Gedung Dan Bangunan | 4 | Baik |
| 4. | Jalan, Jaringan Dan Irigasi | 3 | Baik |
| | (lainnya) | | |

Isu Strategi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial ;
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana ;
5. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun.

Isu Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ;
3. Belum tersusunnya Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan.

Meskipun urusan pemadam kebakaran sudah tidak menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tetapi secara teknis apabila sewaktu-waktu ada laporan dari Call Center 112 ataupun laporan dari warga langsung telah terjadi kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan adanya Team Reaksi Cepat (TRC) siap membantu dan berperan aktif dalam penanganan darurat kebakaran disamping melaksanakan tugas utama penanganan bencana yang sudah menjadi Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendasar pada aspek – aspek yang meliputi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas serta lingkup luas wilayah Kota Madiun.

Sebagai unsur pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas atau Instansi vertikal dan horizontal di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat darurat atau terjadinya bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

A. Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu : **“Menurunnya Resiko Bencana Daerah”** dengan indikator Indeks Risiko Bencana.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana

Tabel 2.1
**MATRIKS PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN
 TAHUN 2023**

| NO. | SEBELUM PENYESUAIAN | | | SESUDAH PENYESUAIAN | | | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------|---|------------------------------|------------|------------|
| | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 26 skor | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 85.25 skor | |
| 2 | Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala | Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala | 100% | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 | |
| 3 | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan/Mitigasi | Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana | 100% | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|--|--|--|--|
| 4 | Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana) | Jumlah Destana yang terbentuk | 6 Desa/Kelurahan | | | | |
| 5 | Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana | Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik | 100% | | | | |
| 6 | Tertanganinya korban bencana | Persentase korban bencana yang tertangani | 100% | | | | |
| 7 | Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana | Persentase bantuan bencana kepada korban bencana | 100% | | | | |

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal maupun pendampingan KemenpanRB maka untuk memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah dilakukan penajaman pada indikator tujuan dan sasaran sehingga menggambarkan kinerja yang jelas dan terukur. Penajaman ini berdampak pada perubahan dokumen perencanaan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan kebijakan sehingga indikator sasaran untuk Nilai reformasi Birokrasi diganti dengan Nilai Sakip Perangkat Daerah.

INDIKATOR KINERJA

Adapun untuk mengetahui lebih jelas tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

| No | Tujuan | Indikator | Kondisi Awal 2022 | Kondisi Akhir 2024 |
|----|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Menurunnya Resiko Bencana Daerah | Indeks Risiko Bencana | 121.06 indeks | 120.50 indeks |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | - | 85.25 Skor | 85.25 Skor | 85.75 Skor |
| 2. | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | - | - | - | 0.35 Indeks | 0.40 Indeks |

B. Rencana Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja setiap perangkat daerah tercapai apabila indikator dari sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan Sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.25 Skor |
| 2. | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 Indeks |

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut dari dana APBD Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp. **3.761.000.000,00** (Tiga Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah).

Berikut Program Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 :

1. Program

Adapun Program Kegiatan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan dana sebesar Rp. 2.364.418.000,00
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan dana sebesar Rp. 1.396.582.000,00

2. Kegiatan

Guna melaksanakan Program tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 melakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.250.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 2.250.000,00.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.682.835.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 1.682.835.000,00.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,00.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.375.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 12.375.000,00.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 374.576.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 374.576.000,00.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.382.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 148.787.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 23.595.000.

2. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.133.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan dana sebesar Rp. 61.133.000,00

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.182.035.000,00
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 85.633.000,00
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan dana sebesar Rp. 16.636.000,00
 - Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan dana sebesar Rp. 47.613.000,00
 - Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 888.600.000,00
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan dana sebesar Rp. 43.553.000,00

- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.064.000,00.
 - Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Edukasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 80.475.000,00
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 22.589.000,00

- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.350.000,00.
 - Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 50.350.000,00

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan good governance juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Selaku pengemban amanah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berkewajiban menyusun atau membuat Laporan Kinerja berdasarkan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dalam bentuk laporan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 yang penyusunannya mengacu pada Penyesuaian Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023.

Untuk setiap sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

➤ **1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
|----|---|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.25 Skor | 85.75 Skor | 100.6% |

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi sasaran dari “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” melebihi target dari yang ditentukan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target (%) | Nilai Kinerja Capaian / Realisasi | | | | | Ket. |
|----|---|------------------------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.25 Skor | - | 77.04 | 80.97 | 85.25 | 85.75 | |

Untuk sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” merupakan sasaran baru di akhir Tahun 2023. Meskipun sasaran baru untuk capaian kinerjanya bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa nilai SAKIP Perangkat Daerah di tahun 2023 meningkat nilainya dari tahun 2022.

- c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Penyesuaian Dokumen Perencanaan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Akhir Renstra (2024) | Realisasi Kinerja 2023 | Capaian Kinerja 2023 dibandingkan dengan akhir Renstra |
|----|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.75 Skor | 85.75 Skor | 100% |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” pada tahun 2023 bila dibandingkan sampai dengan akhir Renstra di Tahun 2024 sesuai target.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional Realisasi kinerja dari Indikator Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Standar Nasional sudah menunjukkan predikat Baik.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi Kinerja 2023 | Kategori | Predikat |
|----|---|------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.75 Skor | A | Memuaskan |

Walaupun Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” ini sudah mencapai predikat Memuaskan (A), namun masih perlu ada upaya untuk terus meningkatkan capaian kinerjanya lagi.

- e. Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja dari Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” ini perlu diuraikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalannya diantaranya :

1. Faktor Pendorong

- a. Adanya kerjasama internal (Sekretariat, Seksi dan Tim Reaksi Cepat (TRC) / Pusdalops pada BPBD Kota Madiun) ;
- b. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan OPD lainnya
- c. Adanya program kegiatan yang telah dilaksanakan
- d. Adanya pendampingan dari Menpan RB dalam proses evaluasi AKIP

2. Faktor Penghambat

- a. Lambatnya koordinasi dengan Seksi2 terkait data dukung

3. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

- a. Telah dilaksanakannya koordinasi internal
- b. Telah dilaksanakannya koordinasi dengan OPD lainnya
- c. Telah dicukupinya data dukung kelengkapan penilaian AKIP

4. Rencana Tindak Lanjut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat maupun Seksi2 serta Pelaksana terkait tata kelola pemerintah guna kecukupan data dukung SAKIP
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan OPD lain

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran ini pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.364.418.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.303.509.756,00. Dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 97.42%.

| No | Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Efisiensi |
|----|---|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 100.6% | 97.42% | 3.18% |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa efisiensi sasaran ini mencapai 3.18%. Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan selesai dan target dapat tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan.

g. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan dalam program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program dan Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

➤ **2. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja dengan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” pada Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
|----|--|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 Indeks | 0.46 Indeks | 131.43% |

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi sasaran dari “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” melebihi dari target yang ditentukan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target (%) | Nilai Kinerja Capaian (%) / Realisasi | | | | | Ket. |
|----|--|---------------------------|-------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 Indeks | 0.41 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | |

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa sasaran kinerja “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tetap tercapai targetnya dan mengalami kenaikan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Penyesuaian Dokumen Perencanaan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Akhir Renstra (2024) | Realisasi Kinerja 2023 | Capaian Kinerja 2023 dibandingkan dengan akhir Renstra |
|----|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.40 | 0.46 | 115% |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” pada tahun 2023 apabila dibandingkan sampai dengan akhir Renstra di Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional Realisasi kinerja dari Indikator Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Standar Nasional yaitu Nihil.

- e. Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja dari Sasaran ini perlu diuraikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan diantaranya :

1. Faktor Pendorong

- a. Perlu adanya kesiapsiagaan dari suatu daerah dalam mengantisipasi ancaman yg ada
- b. Antisipasi bencana demi menekan kerugian baik materiil maupun non materiil
- c. Adanya koordinasi dengan mitra OPD dan Stake Holder terkait penanggulangan bencana berjalan dengan baik
- d. Adanya peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana

2. Faktor Penghambat

- a. Kurang optimalnya komunikasi antar masyarakat, pemerintah dan swasta dalam peningkatan ketahanan daerah
- b. Menyesuaikan jadwal kegiatan dari Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja sasaran ini

3. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

- a. Telah dilaksanakannya koordinasi internal
- b. Telah dilaksanakannya koordinasi dengan mitra OPD dan Stakeholder terkait
- c. Melaksanakan kegiatan yang mendukung ketahanan daerah (Pembentukan SPAB _ Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMPN 1 Kota Madiun, dan Pembentukan Destana – Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Winongo dan Kel. Manguharjo).

4. Rencana Tindak Lanjut :

- a. Meningkatkan komunikasi lebih baik lagi dengan mitra OPD terkait dan Stake Holder
- b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung ketahanan daerah (Sosialisasi, Pembentukan SPAB_Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Pembentukan Destana_Desa / Kelurahan Tangguh Bencana).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.396.582.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.383.150.402,00. Dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99.04%.

| No | Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Efisiensi |
|----|--|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | 115% | 99.04% | 15.96% |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa efisiensi sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” mencapai 15.96%. Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan selesai dan target dapat tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan.

h. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” yaitu Program Penanggulangan Bencana yang didukung oleh Kegiatan :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota ;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ;
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja bisa dilihat dalam pengelolaan keuangan Tahun 2023 melalui tabel realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-----|---|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 2.364.418.000 | 2.303.509.756 | 97.42 |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 1.396.582.000 | 1.383.150.402 | 99.04 |

Analisis Efisiensi anggaran atas penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Rata - rata capaian kinerja | % Serapan Anggaran | Efisiensi Anggaran |
|------------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 100 | 97.42 | 2.58 |
| 2. | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | 100 | 99.04 | 0.96 |

Dengan melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata - rata capaian kinerja dari Sasaran yang telah ditetapkan lebih besar nilainya daripada persentase serapan anggaran maka bisa disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Efisiensi Anggaran telah terpenuhi.

Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui besarnya Efisiensi Anggaran, sebagai berikut :

$$= \text{Rata - rata capaian kinerja} - \text{Serapan anggaran}$$

Sedang untuk Inovasi atau penghargaan yang pernah diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama Tahun 2023 yaitu Penghargaan Nilai SAKIP : 85.75 (A) dan mendapatkan Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan terbaik ke - 5 (lima).

C. PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender adalah strategi dalam pelaksanaan Pembangunan Responsif Gender untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (gender equality) sebagai tujuan ke-5 Sustainable Developments Goals.

Sampai dengan saat ini Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintah dengan kewajiban untuk memenuhi prasyarat-prasyarat gender.

Dalam rangka pengarusutamaan gender di Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun pada Tahun 2023 diwajibkan menyusun anggaran yang berbasis gender.

Berikut Analisa Gender yang telah disusun dalam rangka pengajuan anggaran Tahun Anggaran 2023.

REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) s.d. Tri Wulan III TAHUN 2023
BPBD KOTA MADIUN

| NO | KEGIATAN / SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER | KINERJA | | KEUANGAN | | | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|--|
| | | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | SISA | |
| 1 | Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 1 | 1 | Rp 47.613.000 | Rp 44.572.800 | 3.040.200 | Dilaksanakan bulan Mei 2023 |
| 2 | Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana | 138 | 138 | Rp 85.633.000 | Rp 81.299.520 | 4.333.480 | Dilaksanakan bulan Agustus 2023 |
| 3 | Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 38 | 38 | Rp 888.600.000 | Rp 740.000.800 | 148.600.000 | Dilaksanakan 1 Januari sampai 31 Desember 2023 |

Madiun, 22-11-2023
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
WAHYUDI, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730329 199403 1 003

Act
Go t

Contoh Analisa Gender pada Sub Kegiatan

MATRIK GAP (GENDER ANALYSIS PATHWAY)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

Tahun : 2023

| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| Nama Kebijakan / Program Kegiatan | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | | | Kebijakan Dan Rencana Kedepan | Langkah 7 | Pengukuran Hasil | Langkah 9 |
| | | Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | | | | |
| Kebijakan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat/warga Kelurahan dalam menghadapi ancaman bencana Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tujuan : Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk meminimalkan korban akibat bencana dengan kegiatan mitigasi dalam menghadapi bencana Kelompok Sasaran : Masyarakat Kelurahan rawan bencana | Jumlah Peserta Mitigasi Bencana Tahun 2022 dilaksanakan sejumlah 180 orang untuk Laki - Laki sebanyak : 119 orang dan Perempuan sebanyak 61 orang yang meliputi Relawan bencana Kelurahan Data Bencana sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut : Banjir/Gerangan Air : 3 kali ; Angin Puting Belulang Angin Kencang yang menyebabkan pohon tumbang : 57 kali; rumah roboh : 12 rumah; Pencatatan dan Pertolongan manusia : 10 kali; Evakuasi binatang : 109 kali serta kebakaran 18 kejadian Materi yang diberikan tentang cara menghadapi bencana dimana kegiatan masih netral gender | Akses : Jumlah Peserta mitigasi Bencana Tahun 2022, dimana jumlah peserta Laki - Laki lebih banyak daripada peserta Perempuan. Pertisipasi : Peserta mitigasi Bencana Tahun 2022 untuk peserta Laki - Laki lebih tinggi miratnya Kontrol : Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim oleh Kepala Kelurahan masih banyak laki - laki Manfaat : Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana | Keterbatasan personel yang profesional dalam penanganan bencana dan upaya penyelamatan Keterbatasan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan kegiatan ini Kebijakan tentang calon peserta masih netral gender | Persepsi masyarakat bahwa keterampilan dan pengetahuan tentang penanganan suatu bencana atau kejadian adalah untuk laki-laki Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya perempuan dalam menghadapi suatu bencana atau kejadian | Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik laki - laki maupun perempuan dalam menghadapi bencana Hasil (Out come) : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat menghadapi bencana | Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam bentuk mitigasi bencana Keluaran (Out put) : Terbentuknya masyarakat yang tangguh dan terlatih dalam menghadapi Bencana Narasumber diperlukan guna mendukung kegiatan dimaksud, dengan Jumlah Narasumber Laki - Laki sebanyak : 4 Orang | Jumlah Peserta Mitigasi Bencana Tahun 2022 dilaksanakan sejumlah 180 orang untuk Laki - Laki sebanyak : 119 orang dan Perempuan sebanyak 61 orang yang meliputi Relawan bencana Kelurahan Narasumber diperlukan guna mendukung kegiatan dimaksud, dengan Jumlah Narasumber Laki - Laki sebanyak : 4 Orang | Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana dan penanggulangannya Materi : 30% masalah pengetahuan kebencanaan dan 70 persen keterampilan dalam menghadapi bencana Peserta dari warga masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan dan Relawan Kota Madiun Untuk Narasumber Laki - Laki : 4 orang |

Madiun, 10 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106 199003 1 009

Activate W
Go to Settings

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Analisa Gender terhadap 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan :
 1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian keberhasilan sasaran capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 serta dalam mewujudkan good governance yang sudah terealisasi sesuai dengan target dan efisien.

Capaian Kinerja yang telah dicapai berdasarkan sasaran dan indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 semuanya dapat terealisasi bahkan sampai melebihi 100%. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen, baik dari masyarakat, pemangku kepentingan (Stakeholder) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun para Team Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana. Namun ada beberapa kendala atau masalah yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan upaya - upaya yang telah dilaksanakan guna mengatasi kendala tersebut yaitu dengan pemanfaatan peralatan penanggulangan bencana dan logistik yang ada secara maksimal serta penggunaan yang efisien dan efektif terhadap minimnya sarana dan prasarana atau peralatan penanggulangan bencana serta kurangnya logistik dalam pemenuhan penanggulangan bencana.

Berdasarkan capaian kinerja yang sudah tercapai dengan target yang telah ditentukan dan untuk tindak lanjut ditahun berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi dengan melanjutkan program kegiatan yang telah direncanakan dengan melakukan upaya – upaya pencegahan bencana, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana struktural dan non struktural, kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya bencana, mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program kegiatan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN :

- a. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ;
- b. Pohon Kinerja BPBD Kota Madiun ;
- c. Penyesuaian Dokumen Perencanaan Tahun 2021-2024 ;
- d. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dan Berita Acara Evaluasi Internal



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUDI, S.Sos

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

Jabatan : WALI KOTA MADIUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

Madiun, 15 September 2023
Pihak Pertama,

WAHYUDI, S.Sos
NIP 196711061990031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.25 Skor |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 Indeks |

| No | Program | Anggaran |
|----|---|--------------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.364.418.000 |
| 2. | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.396.582.000 |
| | Jumlah | Rp. 3.761.000.000 |

Madiun, 15 September 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**


WALIKOTA MADIUN
Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd


WAHYUDI, S.Sos
NIP 196711061990031009



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun, 63136 Jawa Timur

Telepon (0351) 491991 Faks (0351) 491991

Laman <http://www.bpbd.madiunkota.go.id>, Pos-el bpbdrescue45@gmail.com

BERITA ACARA
PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN

NOMOR : 050 / 549 / 401.206 / 2023

Pada hari ini tanggal 1 Agustus 2023 bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. WAHYUDI

NIP : 19671106 199003 1 009

Jabatan : Kepala Pelaksana

Menyatakan bahwa sehubungan adanya dinamika isu strategis di Pemerintah Kota Madiun maka dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagaimana terlampir. Dokumen dimaksud dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
Madiun, 1 Agustus 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP 196711061990031009

Mengetahui,

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MADIUN

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator :
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- Meningkatnya kualitas perencanaan
Indikator :
Nilai Komponen Perencanaan SAKIP
- Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja
Indikator :
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja AKIP
- Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja
Indikator :
Nilai Komponen Pelaporan SAKIP
- Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja
Indikator :
Nilai Komponen evaluasi SAKIP

- Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan
Indikator :
Jumlah dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan
- Pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan
Indikator :
Jumlah dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan
- Penyusunan dokumen pelaporan sesuai dengan ketentuan
Indikator :
Jumlah dokumen pelaporan sesuai dengan ketentuan
- Penyusunan dokumen evaluasi internal
Indikator :
Jumlah dokumen evaluasi internal sesuai dengan ketentuan

Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana
Indikator :
Indeks Ketahanan Daerah

- Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Indikator :
Jumlah Desa Tangguh Bencana
- Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana
Indikator :
Response Time Rate penanganan bencana
- Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Indikator :
Persentase Rehabilitasi

- Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kepada masyarakat dan aparatur
Indikator :
Jumlah masyarakat dan aparatur yang aktif dalam mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
- Peralatan dan Perlindungan guna kesiapsiagaan bencana yang siap pakai
Indikator :
Jumlah peralatan dan perlindungan dalam kesiapsiagaan bencana
- Penyusunan dokumen kebencanaan
Indikator :
Jumlah dokumen kebencanaan yang telah disusun
- Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Kebencanaan
Indikator :
Jumlah orang yang memperoleh Sosialisasi Informasi Kebencanaan
- Pembentukan Desa/Kelurahan/ Kawasan Tangguh Bencana
Indikator :
Jumlah Destana/Kawasan yang dibentuk
- Percepatan petugas yang aktif dalam penanganan bencana
Indikator :
Jumlah korban bencana yang di evakuasi
- Sarana prasarana serta logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam kondisi baik
Indikator :
Jumlah sarana prasarana logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Penyediaan Personil Team Reaksi Cepat (TRC) yang aktif dalam penanganan bencana
Indikator :
Jumlah petugas Team Reaksi Cepat (TRC) yang aktif dalam penanganan bencana
- Penyusunan dokumen pendataan korban pasca bencana
Indikator :
Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana
- Penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana yang tepat sasaran
Indikator :
Persentase jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial

**MATRIKS PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN
TAHUN 2023**

| NO. | SEBELUM PENYESUAIAN | | | SESUDAH PENYESUAIAN | | | KETERANGAN |
|-----|---|---|--------------------|---|------------------------------|--------------|------------|
| | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | |
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 26 (Skor) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.25 (Skor) | |
| 2. | Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala | Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala | 100% | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 | |
| 3. | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan / Mitigasi | Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana | 100% | | | | |
| 4. | Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana) | Jumlah Destana yang terbentuk | 6 Desa / Kelurahan | | | | |
| 5. | Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana | Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik | 100% | | | | |
| 6. | Tertanganinya korban bencana | Persentase korban bencana yang tertangani | 100% | | | | |
| 7. | Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana | Persentase bantuan bencana kepada korban bencana | 100% | | | | |

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



H. WAHYUDI

Pembina Tingkat I

NIP. 196711061990031009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kota : Madiun

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang - undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | BPBD Kota Madiun | Nilai SAKIP BPBD Kota Madiun |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | 2. Indeks Ketahanan Daerah | | Indeks Ketahanan Daerah |

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



H. WAHYUDI

Pembina Tingkat I

NIP 196711061990031009

MATRIK RENSTRA PERUBAHAN 2
SESUAI POKIN
(DESK MENPAN)

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | |
|--|--|------|------------------------------------|--|---|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--|--------|---------------------------------|------|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | |
| <u>Tahun 2021 :</u> Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh | | | | <u>Tahun 2021 - 2022 :</u> Cakupan penanganan penanggulangan bencana bencana | 100% | | - | | - | | - | | - | | | BPBD |
| <u>Tahun 2022 - 2024:</u> Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana | | | | <u>Tahun 2022-2024</u> Indeks Risiko Bencana | - | | 121.06 Indeks | | 121,00 Indeks | | 120 Indeks | | 120 Indeks | | | |
| <u>Tahun 2023 - 2024:</u> Menurunnya Resiko Bencana Daerah | | | | <u>Tahun 2023-2024 :</u> Indeks Risiko Bencana | - | | 121.06 Indeks | | 121,00 Indeks | | 120.50 Indeks | | 120.50 Indeks | | | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | - | | 26 Skor | | 26 Skor | | 27 Skor | | 27 Skor | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana | | 4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondial baik | - | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | 5. Tertanganinya korban bencana | | 5. Persentase korban bencana yang tertangani | - | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | 6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana | | 6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana | - | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | 2023 - 2024 : | | 2023-2024 : | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | | 85.25 Skor | | 85.25 Skor | | 85.75 Skor | | 85.75 Skor | | |
| | 2. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana | | 2. Indeks Ketahanan Daerah | - | | - | | 0.35 Indeks | | 0.40 Indeks | | 0.40 Indeks | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM : | | | | | | | | | | | |
| | | 1 . 0 5 . 0 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 80.75 Skor | 1,939,072,000 | 85.25 Skor | 2,182,695,000 | 85.25 Skor | 2,280,000,000 | 85.75 Skor | 2,456,000,000 | 85.75 Skor | 8,857,767,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|---------------|
| | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | 2 0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 80,000,000 |
| | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah | 12 dok | 20,000,000 | 12 dok | 20,000,000 | - | - | - | - | 100% | 40,000,000 |
| | | 0 6 | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | - | - | 6 laporan | 20,000,000 | 6 laporan | 20,000,000 | 100% | 40,000,000 |
| | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | 2 0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan | 100% | 1,215,480,000 | 100% | 1,276,195,000 | 100% | 1,325,000,000 | 100% | 1,376,000,000 | 100% | 5,192,675,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|------|-------------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------|--|
| | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 . 0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah | - | - | 100% | 100,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 210,000,000 | |
| | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor | - | - | 100% | 100,000,000 | - | - | - | - | 100% | 100,000,000 | |
| | | 1 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | - | 5 Unit | 50,000,000 | 5 Unit | 60,000,000 | 100% | 110,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 . 0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah | 100% | 456,092,000 | 100% | 505,000,000 | 100% | 560,000,000 | 100% | 625,000,000 | 100% | 2,146,092,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|------|-------------|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------|---------------|
| | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan peralatan perlengkapan kantor yang representatif / | 100% | 456,092,000 | 100% | 505,000,000 | - | - | - | - | 100% | 961,092,000 |
| | | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | - | 12 laporan | 560,000,000 | 12 laporan | 625,000,000 | 100% | 1,185,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | 209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan | 100% | 197,500,000 | 100% | 221,500,000 | 100% | 255,000,000 | 100% | 295,000,000 | 100% | 969,000,000 |
| | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kendaraan dinas operasional / lapangan yang layak digunakan | 100% | 157,500,000 | 100% | 175,000,000 | - | - | - | - | 100% | 332,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|------|---------------|------|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| | | 02 | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | - | - | 8 unit | 195,000,000 | 100% | 215,000,000 | 100% | 410,000,000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase gedung yang layak digunakan | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | - | - | - | - | 100% | 55,000,000 |
| | | 09 | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | - | 1 unit | 40,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 90,000,000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan | 100% | 15,000,000 | 100% | 16,500,000 | - | - | - | - | 100% | 31,500,000 |
| | | 10 | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | - | 5 unit | 20,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 50,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM | | | | | | | | | | | |
| | | 10503 | Penanggulangan Bencana | Persentase Korban Bencana Yang Ditangani | 100% | 1,388,869,000 | 100% | 1,717,305,000 | 100% | 2,065,000,000 | 100% | 2,505,000,000 | 100% | 7,676,174,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|
| | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | 2 . 0 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 103,880,000 | 100% | 210,565,000 | 100% | 225,000,000 | 100% | 245,000,000 | 100% | 784,445,000 |
| | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota | Persentase dokumen yang disusun | - | - | 100% | 85,000,000 | - | - | - | - | 100% | 85,000,000 |
| | | 0 1 | | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | - | - | - | - | 1 dokumen | 85,000,000 | 1 dokumen | 85,000,000 | 100% | 170,000,000 |
| | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana | 100% | 103,880,000 | 100% | 125,565,000 | - | - | - | - | 100% | 229,445,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|---|------|------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | 01 | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | - | - | - | - | 1 dokumen | 85,000,000 | - | - | 1 dokumen | 85,000,000 |
| | | | Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan | 100% | 92,253,000 | 100% | 141,350,000 | - | - | - | - | 100% | 233,603,000 |
| | | 02 | | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | - | - | - | - | 200 orang | 155,000,000 | 200 orang | 180,000,000 | 400 orang | 335,000,000 |
| | | 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | - | - | - | - | 5 unit | 50,000,000 | 5 unit | 75,000,000 | 5 unit | 125,000,000 |
| | | | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan | Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan | 100% | 78,686,000 | 100% | 90,000,000 | - | - | - | - | 100 | 168,686,000 |
| | | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | - | - | - | - | 6 kawasan | 100,000,000 | 7 kawasan | 120,000,000 | 7 kawasan | 220,000,000 |

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM | TARGET | | | REALISASI | | ANALISIS CAPAIAN KINERJA | KET. (TINDAK LANJUT) |
|----|---|------------------------------|---|---------|----------------|---------------|-----------|---------------|--|----------------------|
| | | | | KINERJA | SATUAN KINERJA | ANGGARAN (Rp) | KINERJA | ANGGARAN (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 85.25 | Skor | 2,364,418,000 | 85.75 | 2,303,509,756 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai melebihi target | |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Penanggulangan Bencana | 0.35 | Indeks | 1,396,582,000 | 0.46 | 1,383,150,402 | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Madiun tercapai melebihi target | |
| | | | | | | 3,761,000,000 | | 3,686,660,158 | | |

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106 199003 1 009



BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua* bulan *Januari* Tahun *Dua* ribu *dua* puluh *empat* bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAHYUDI
NIP : 19671106 199003 1 009
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun

Berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.102/05/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran/Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

2. Nama : SILVERINA KOESOEMAWATI,SKM,M.Kes
NIP : 19670701 199102 2 001
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 050/022/401.206/2022 taggal 10 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun periode *01 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023* dengan hasil sebagai berikut :

A. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebesar Rp. 3.761.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan Bulan : Desember 2023 sebesar Rp. 3.686.660.158,00 atau 98.02%.

Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. 74.339.842,00 atau 1.98%.

B. CAPAIAN KINERJA

Sesuai Realisasi Anggaran belanja serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan Bulan : Desember 2023, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja didapatkan hasil sebagaimana berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85.25 Skor | 85.75 Skor | 100.6% |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0.35 Indeks | 0.46 Indeks | 131.43% |

Strategi dan Kebijakan yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja sesuai target dengan :

1. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja ini berdasarkan kebijakan yang dikomando oleh Kepala OPD (Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun).
2. Telah dilaksanakannya Sosialisasi, Pelatihan / Mitigasi Penanggulangan Bencana dan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

C. FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA

Adanya kerjasama antar karyawan dan karyawan serta anggaran yang mendukung tercapainya keberhasilan kinerja.

D. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

--

E. RENCANA TINDAK LANJUT PADA TRIWULAN BERIKUTNYA

Melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai jadwal / Rencana Aksi yang direncanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106 199003 1 009

Madiun, 02 Januari 2024

KETUA TIM SAKIP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Silverina Koesoemawati', written over the text 'KETUA TIM SAKIP'.

SILVERINA KOESOEMAWATI, SKM, M.Ke
Pembina
NIP. 19670701 199102 2 001